

## ABSTRAK

**Diyar Ginanjar Andiraharja** : *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu.*

Norma Pasal 462 UU No.7 Tahun 2017 menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi KPU untuk menolak rekomendasi atau putusan Bawaslu yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu, namun pada kenyataannya putusan dan rekomendasi Bawaslu tidak serta merta dijalankan oleh KPU, baik dikarenakan adanya perbedaan tafsir hukum atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun dengan argumentasi demi kepentingan hukum yang lebih luas. Terdapat disparitas putusan Bawaslu dengan eksekusi putusan Bawaslu yang menjadi kewenangan KPU di tataran praktik, sehingga sanksi administratif yang semestinya bersifat reparatoir tidak dapat terwujud. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas penegakan keadilan Pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan menganalisis penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu agar dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran.

Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori negara hukum dengan teori demokrasi yang menjelaskan bagaimana Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat, teori keadilan Pemilu dan teori kewenangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data di lapangan. Kemudian, bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan: 1) Terdapat hambatan dalam implementasi kewenangan, yakni demi suatu kepentingan hukum yang lebih luas KPU dapat tidak melaksanakan putusan Bawaslu, adanya perbedaan atas norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga terjadi disparitas pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat, penerapan norma Pasal 464 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap belum efektif dikarenakan sampai saat ini belum ada penyelenggara teknis yang diadukan terkait tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu, dan pada norma Pasal 464 terdapat subjek hukum peserta Pemilu yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan subjek teradu di DKPP namun dalam norma Pasal 464 dimungkinkan menjadi teradu. 2) Terdapat pada 103 (seratus tiga) jumlah putusan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Sejatinya sifat sanksi yang diberikan bersifat reparatoir yakni mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, namun karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada di KPU, maka di tataran praktik keputusan Bawaslu belum tentu efektif.

**Kata Kunci** : Bawaslu Kabupaten/Kota, Keadilan Pemilu, Kedudukan, Kewenangan, Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

## ABSTRACT

**Diyar Ginanjar Andiraharja:** *The position and authority of the Regency/City Bawaslu in Handling Election Administration Violations is related to the Enforcement of Election Justice.*

*The norm of Article 462 of Law No. 7 of 2017 confirms that there is no reason for the KPU to reject the recommendations or decisions of Bawaslu which are the realm of Bawaslu's authority, but in fact the decisions and recommendations of Bawaslu are not immediately carried out by the KPU, either due to differences in legal interpretations of Law No. 7 of 2017 concerning Elections as well as with arguments for the sake of a wider legal interest. There is a disparity in Bawaslu's decisions with the execution of Bawaslu decisions which are the authority of the KPU at the practical level, so that administrative sanctions that should be reparative cannot be realized. This can affect the quality of election justice enforcement.*

*The purpose of this study was to analyze the position and authority of Regency/Municipal Bawaslu in handling election administration violations and to analyze the handling of election administration violations related to the enforcement of election justice so that it can be used as a solution to improve the effectiveness and quality of handling violations.*

*This thesis is based on several theories, including: the theory of the rule of law with the theory of democracy which explains how elections are a form of people's sovereignty, the theory of electoral justice and the theory of authority.*

*This research was conducted using a normative juridical method where the study of literature is the main material in writing this thesis, and is also supported by data in the field. Then, the collected materials were analyzed descriptively qualitatively.*

*Based on the results of the study, it was concluded: 1) There are obstacles in the implementation of authority, namely for the sake of a wider legal interest the KPU may not implement the Bawaslu decision, there are differences in the norms of Law No. 7 of 2017 concerning Elections so that there is a disparity in the implementation of the recommendations of election supervisors in In the area of West Java Province, the application of the norms of Article 464 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections is considered ineffective because until now there have been no technical administrators who have complained regarding the non-implementation of the Bawaslu decision, and in the norm of Article 464 there are legal subjects participating in the General Election which basically do not can be used as a contested subject in DKPP but in the norm of Article 464 it is possible to become a contestant. 2) There are 103 (one hundred and three) decisions on election administration violations as a result of the process of handling election administration violations in regencies/cities in the West Java region. Indeed, the nature of the sanctions given is reparatory in nature, namely returning to its original condition before the violation occurred, but because the executor of the decision is in the KPU, at the practical level, Bawaslu's decisions are not necessarily effective.*

**Keywords:** *Authority, Election Justice, Handling Election Administration Violations, Position, Regency/City Bawaslu.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG